

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah yang luas, oleh karena itu pemerintah pusat membuat kebijakan untuk melakukan desentralisasi pemerintahan. Yaitu, dimana setiap daerah dapat mengelola pemerintahannya, dengan alasan untuk menjadikan daerah-daerah yang ada di Indonesia menjadi daerah yang otonom yang mandiri. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang ditetapkan dengan undang-undang (Abdul Halim, 2012:D-10).

Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang dulunya sentralistik berubah menjadi pemerintah yang mengurangi ketergantungan pemerintah pusat. Hal ini didasari oleh semakin besar dan beragamnya kebutuhan dan persoalan masyarakat sehingga kebutuhan desentralisasi semakin dibutuhkan. Desentralisasi fiskal menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006) yaitu pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun pengeluaran adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak dapat

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Selain melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal Pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit anggaran. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Baldrick, 2015:29). Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang dimiliki serta berkewajiban untuk melaporkan informasi yang terkait dengan penggunaannya dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel dan transparan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 bahwa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda. Dengan adanya APBD dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat anggaran juga merupakan suatu laporan yang memuat penerimaan dan pembelanjaan negara/daerah. Didalam laporan itu ditetapkan target-target yang akan dicapai oleh pemerintah dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran.

Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk pemerintah daerah dapat terpenuhi, belanja daerah terdiri dari belanja oprasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendanaan penyelenggaraan pemerintah agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintah, maka diatur pendanaan pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sumber penerimaan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketika penerimaan dari pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya.

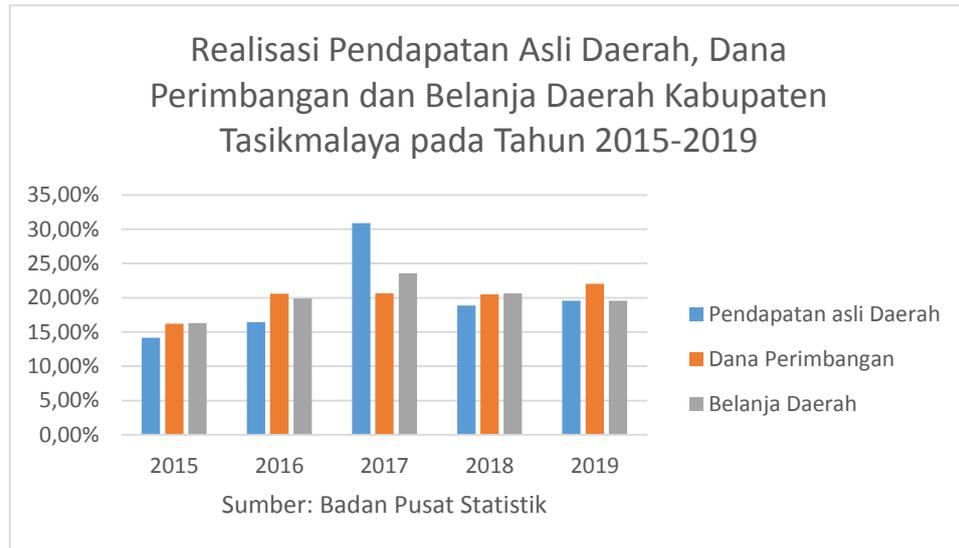
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Dana Transfer merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang di transfer dalam bentuk dana perimbangan dari pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya juga akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah serta pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan.

Dilansir dari radartasikmalaya.com oleh Diki Setiawan 4 November 2017, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki peranan penting. Pada tahun 2017 adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pemkab menambah anggaran Rp. 900 miliar lebih di perubahan. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhiat menjelaskan bahwa APBD perubahan tahun 2017 sudah disahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)-nya. Di APBD tersebut Pemkab

menganggarkan Rp 900 miliar lebih, hampir 1 triliun. Sebelumnya APBD murni 2017 Rp 2 triliun lebih. Dalam sisa waktu dua bulan penyerapan APBD perubahan 2017 akan dimaksimalkan. Akan tetapi terjadi telatnya pengesahan APBD perubahan 2017 namun bukan terjadi untuk yang pertama kali tetapi sudah pernah mengalami di tahun sebelumnya. Penyerapan APBD murni sampai perubahan ini pemkab bisa mencapai 93-94 persen. Jadi kendala telatnya disahkan APBD perubahan ini karena ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, sehingga pemkab harus mencari uang untuk defisit. Kenapa terjadi defisit tersebut karena banyak anggaran yang diputuskan dalam APBD murni 2016-2017 disaat pembayaran tidak ada karena DAU nya dipotong dari pusat.

Dilansir dari radartasikmalaya.com oleh Diki Setiawan 24 Januari 2018, mengungkapkan Anggaran Kabupaten Tasikmalaya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2018 turun dari Rp. 34.000.000.000 menjadi Rp. 22.000.000.000. ketua komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST menjelaskan penurunan tersebut karena alokasi APBD 2018 juga menurun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digali secara optimal.

Adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya mengalami kendala telatnya disahkan APBD murni tahun 2016-2017 dan terjadinya defisit karena banyak anggaran yang diputuskan dalam APBD murni tahun 2016-2017 hal ini terjadi karena adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian APBD murni di tahun 2018 mengalami penurunan hal ini terjadi dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digali secara optimal.



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2015-2019

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 di tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Namun sangat disayangkan pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan cukup tinggi sebesar Rp 157.914.265.590 yaitu dari Rp 406.334.651.920 pada tahun 2017 menjadi Rp 248.420.386.330 pada tahun 2018. Sementara Kontribusi Dana Perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun di tahun 2018 mengalami penurunan akan tetapi tidak terlalu tinggi dari Rp 2.083.179.479.120 pada tahun 2017 turun menjadi Rp2.067.009.180.840 pada tahun 2018 untuk Belanja Daerah juga pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dimana Belanja Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 3.957.519.458.000 menjadi Rp 3.463.278.195.500 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 3.284.673.387.400. dengan demikian peranan Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya relatif besar begitu pula dengan peranan Dana Perimbangan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang relatif besar dimana dapat mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Searah dengan uraian di atas, penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dari :

Rihfenti Ernayani (2017), Haryono dan Sri Kuncoro (2009), Fanny Nailufar dan Sufitrayati (2019), Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2014), Bambang Suprayitno (2015), Ni Komang Widya Anggaraini dan I Made Suryana Utama (2018), NI Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana (2018), Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryanti (2018) dan Desak Gede Yudi Artika Sari, Putu Kepramareni dan Ni Luh Gede Novita Sari (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Belanja Daerah dan Belanja Modal yang merupakan bagian dari Belanja Daerah.

Haryono dan Sri Kuncoro (2019), Fanny Nailufar dan Sufitrayati (2019), Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2014), Bambang Suprayitno (2015) dan Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) dalam hasil penelitian nya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan bagian dari Dana Perimbang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Daerah dan Belanja Modal yang merupakan bagian dari Belanja Daerah.

Diah Nurdiwaty dan Bdrus Zaman (2017), Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017), Ni Komang Widya Anggaraini dan I made Suryana Utama (2018) dan Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Belanja Daerah dan Belanja Modal yang merupakan bagian dari Belanja Daerah.

Wildan Dwi Darmawan (2017) dan Putu Nandya Indah Pratami dan Dwiranda (2017) dalam hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja daerah.

Putu Nandya Indah Pratami dan Dwiranda (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Dan Perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
1	Rihfenti Ernayani 2017 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur	-Variabel independen yang digunakan Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen yang digunakan Belanja Daerah -Analisis data menggunakan regresi linier	-Variabel independen yang digunakan Dana alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus -Indikator pendapatan asli daerah penulis dengan peneliti terdahulu berbeda.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Dan Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	JURNAL SOSIAL HUMANI ORA DAN PENDIDI KAN VOL. 1 NO.1 ISSN 2580 – 5398

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
		berganda dan menggunakan spss.			
2	Haryoso dan Sri Kuncoro 2019 Kabupaten/ Kota Eks Karesidenan Surakarta	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan variabel dependen Belanja Daerah -Metode dan alat yang digunakan regresi linier berganda -Indikator pendapatan asli daerah sama dengan indikator yang dipakai penulis.	Tempat penelitian, peneliti terdahulu menggunakan sampel 7 Kabupaten/kota penulis menggunakan sampel 1 kabupaten atau kota.	Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Akuntansi Dan Keuangan ISSN: 2337-568x VOL 4, NO 1 (2019), JULI ; P.52-61; HTTPS://E JOURNAL .STIE- AUB.AC.I D/INDEX. PHP/AKT UAL
3	Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti dan Danang Minto Yuono 2017 Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan variabel dependen Belanja Daerah, -Alat analisis yang digunakan regresi berganda	- tempat dan waktu penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 21 No.1
4	Bambang Suprayitno 2015 Provinsi di Pulau Jawa	-Variabel independen Pendapatan asli Daerah -Memakai data sekunder dan diperoleh dari BPS menggunakan analisis regresi linear berganda.	-Penulis menggunakan Dana Perimbangan sebagai variabel independen dan peneliti sebelumnya menggunakan Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan pertumbuhan Ekonomi	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 106 - 112 ISSN 2339 - 1545

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
			sebagai variabel independen	berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal	
5	Ni Komang Widya Anggaraini dan I Made Suryana Utama 2018 di Wilayah Bali Timur	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan -Data yang digunakan menggunakan data <i>Time Series</i> .	-Analisis yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan analisis jalur atau <i>Path Analysis method</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA, Vol.7, No.6 Juni 2018 1230
6	Putu Nandya Indah Pratami dan Dwiranda 2017 di Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan -Indikator yang digunakan sama -Teknik analisis nya menggunakan analisis linear berganda.	-Peneliti terdahulu menggunakan teknik sampel jenuh.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.2. Februari (2017): 1141-1170 ISSN: 2302-8556
7	Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana 2018 di Pemerintah Kabupaten Bandung	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, dan variabel dependen Belanja Daerah -Indikator yang digunakan sama -Teknik analisis memakai analisis regresi linear berganda.	-Tempat, waktu dan lokasi penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2. November (2018): 877-904

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
8	Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini 2018 di Provinsi Bali	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah -Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi linier berganda.	-Penulis menggunakan Dana Perimbangan sebagai variabel independen lainnya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN : 2302-8912
9	Wildan Dwi Dermawan 2017 Di Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen Belanja Daerah -Indikator yang digunakan dalam pendapatan asli daerah sama.	-Penulis menggunakan Dana Perimbangan sebagai variabel dependen -Alat analisis regresi linier sederhana	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ilmiah EDUKASI Volume. 5 Nomor 2, November 2017 eISSN: 2580-8818
10	Fanny Nailufar dan Sufitrayati 2019 di Kota Banda Aceh	-Variabel independen Pendapatan asli Daerah dan variabel dependen Belanja Daerah -Indikator yang digunakan dalam pendapatan asli daerah dan belanja daerah sama -Alat analisis memakai analisis regresi linier berganda.	-Variabel independen peneliti terdahulu menggunakan Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.	<i>JURNAL SAMUDRA</i> <i>A EKONOMI DAN BISNIS</i> , <i>VOL 10, NO 1</i> <i>JANUARI 2019</i> P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523
11	Diah Nurdiwati, Badrus Zaman dan	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana	-Variabel independen Pertumbuhan Ekonomi	secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap	JURNAL APLIKASI BISNIS, Vol.17 No.1

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
	Efda Kristinawati 2017 di Jawa Timur	Perimbangan dan Belanja Modal yang merupakan bagian dari Belanja Daerah -Alat analisis menggunakan analisis regresi linier berganda -Indikator yang digunakan dalam pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sama.	-Sampel penelitian peneliti terdahulu menggunakan <i>Totaling Sampling</i> -Indikator yang digunakan dalam dana perimbangan penulis dengan peneliti terdahulu berbeda.	pengalokasian anggaran Belanja Modal, Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Daerah.	Bulan Juli Tahun 2017. p-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217
12	Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto 2017 di Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen Belanja Daerah -Indikator yang digunakan dalam pendapatan asli daerah sama.	-Variabel independen DAU, DAK dan DBH sebagai variabel pemoderasi -Alat analisis data yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi dengan variabel moderasi.	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil bukan variabel Pemoderasi.	Jurnal Ilmiah WI DYA Ekonomik a Volume 1 Nomor 2 Mei 2017
13	Kesit Bambang Prakosa 2004 di Provinsi Jawa Tengah dan DIY	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen Belanja Daerah -Indikator pendapatan asli daerah sama	-Penulis menggunakan variabel independen lain yaitu Dana Perimbangan	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja.	Kesit Bambang Prakosa, <i>Analisis Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU) dan Pendapata n Asli Daerah ...</i>

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
		-Alat analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.			ISSN: 1410 – 2420 JAAI VOLUME 8 NO. 2, DESEMBER 2004
14	Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi 2014 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	-Variabel independen Pendapatan asli Daerah dan variabel deppenden Belanja Daerah -Indikator yang digunakan dalam pendapatan asli daerah penulis dengan peneliti terdahulu sama.	-Variabel independen Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk -alat analisis yang digunakan peneliti terdahulu adalah regresi data panel	Secara parsial dan simultan Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah yaitu Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung dan jumlah penduduk mengurangi peningkatan Belanja Langsung.	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 2, Oktober-Desember 2014 ISSN: 2338- 4603
15	Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar 2017 di Kota Bandung	-Variabel independen Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan variabel dependen Belanja Daerah	- tempat dan waktu penelitian.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76 e2579-9991, p2579-9975 http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka
16	Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni dan Ni Lus Gde Novitasari 2017 Kabupaten/ Kota Se-Bali	-Variabel independen Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan dan variabel dependen Belanja Modal yang bagian	-Variabel independen Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembayaran anggaran	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal, sementara Pendapatan Asli Daerah dan Sisa	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1 Juli 2017 ISSN: 2301-8879

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
		dari Belanja Daerah -Alat analisis menggunakan regresi linier berganda -Indikator pendapatan asli daerah sama		Lebih Pembayaran Anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.	Available Online At: https://ejournal.warna.dewa.ac.id/index.php/krisna
17	Febdwi Suryani dan Eka Pariani 2018 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah -Indikator pendapatan asli daerah -Alat analisis yang digunakan regresi linear berganda.	-Penulis menggunakan variabel independen lain yaitu Dana Perimbangan.	Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi UMUM memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No 1 Tahun 2018 P-ISSN: 2337-652x E-ISSN: 2598-3253
18	Andreas Marzel Pelealu 2013 di Pemerintah Kota Manado	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah -Indikator pendapatan asli daerah penulis dengan peneliti terdahulu sama.	-Penulis menggunakan variabel independen Dana Perimbangan dan peneliti terdahulu menggunakan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen -Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah metode analisis ekonometrika	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Manado.	Jurnal EMBA 1189 Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1189-1197 ISSN 2303-1174
19	Suryana 2018	-Variabel independen	-Penulis menggunakan	Secara parsial Pendapatan Asli	

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
	di Provinsi Jawa Barat	Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah	variabel independen Dana Perimbangan dan menggunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen -Metode yang digunakan <i>Explanatory Research.</i>	daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis– Vol 9 No 2 September 2018
20	Gregorius N. Masdjo dan Sukartono 2009 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	-Variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan variabel dependen Belanja Daerah - Alat analisis yang digunakan regresi linier berganda.	-peneliti terdahulu menggunakan Analisis <i>Flypaper Efect</i> sebagai variabel dependen -Indikator belanja daerah peneliti terdahulu dengan penulis berbeda.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah dan dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	Telaah Manajemen ISSN:1693-9727 TEMA Vol 6 Edisi 1, Maret 2009
	Mita Nurlela, 2020 Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2019)				

Berkaitan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mengajukan usulan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2019)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010-2019.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010-2010.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010-2019.

3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual dan partikal dalam pengembangan konsep ilmu ekonomi khususnya akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Semoga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dalam meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintah khususnya

mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tasikmalaya melalui pengambilan data dari *websitewww.jabar.bps.go.id*.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai bulan September 2020 dengan rincian terlampir.